

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 menguraikan tentang hasil Capaian Target pada RKPD 2015, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 8.997 km² atau sekitar 5,85% dari luas Kalimantan Tengah (153.564 km²). Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.

2. Kondisi Topografi

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- a. Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8°-15°, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan $\pm 15^{\circ}$ -25°
- b. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0°-8° serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maliku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014

3. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta *geologi* formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium *Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang

dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara didominasi tanah podsol dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai

4. Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- Sungai Kahayan dengan panjang ± 600 km;
- Sungai Sebangau dengan panjang ± 180 km;
- Sungai Anjir Kalampan dengan panjang $\pm 14,6$ km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang $\pm 6,5$ km;
- Sungai Anjir Basarang dengan panjang ± 24 km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 7 km;
- Sungai Terusan Raya dengan panjang ± 18 km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang ± 6 km;
- Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan pantai sepanjang $\pm 153,4$ km dari timur ke barat.

Tabel 2.2 Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau

No	Nama Sungai/Anak Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014

5. Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara 26,5⁰C – 27,5⁰C dengan suhu rata-rata maksimum 32,5⁰C dan minimum 22,9⁰C. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari diatas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan dan Lahan Areal Non Hutan mengacu kepada Surat keputusan Nomor 529/Menhut-II/2012 dengan rincian pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan dan Non Hutan Kabupaten Pulang Pisau

No	Nomenklatur	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	HL	217.001,94	20,96
2	KSA/KPA	254.260,85	24,56
3	HP	284.960,03	27,52
4	HPT	18.030,43	1,74
5	HPK	68.441,73	6,61
6	APL	179.844,91	17,37
7	Badan Air	12.898,34	1,25
	Total	1.035.438,23	100,00

7. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan.

a. Gambaran Umum Penduduk Pulang Pisau

Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 124.015 jiwa, yang terdiri atas 64.517 laki-laki dan 59.498 perempuan. Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maluku adalah dua kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 27.393 jiwa dan 23.544 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sekitar 8.997 Km² yang didiami oleh 124.015 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 14 orang per kilometer persegi. Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 76,09 penduduk per km², diikuti Kecamatan Maluku sebanyak 56,99 penduduk per km². Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah kecamatan adalah Sebangau Kuala, hanya 2,13 penduduk per km². (Lihat Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per (Km ²)
1	Kahayan Kuala	1.155,00	20.321	17,59
2	Sebangau Kuala	3.801,00	8.081	2,13
3	Pandih Batu	535,86	20.301	37,88
4	Maliku	413,14	23.544	56,99
5	Kahayan Hilir	360,00	27.393	76,09
6	Jabiren Raya	1.323,00	8.083	6,11
7	Kahayan Tengah	783,00	7.592	9,70
8	Banama Tingang	626,00	8.700	13,90
JUMLAH TOTAL		8.997,00	124.015	13,78
Tahun 2013			123.278	
Tahun 2012			122.358	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014

b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari laki-laki 64.517 jiwa dan perempuan 59.498 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 108,44. Dengan demikian, terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, dan kepadatan penduduk (*density*) mencapai 13,78 jiwa per km². (Tabel 2.5)

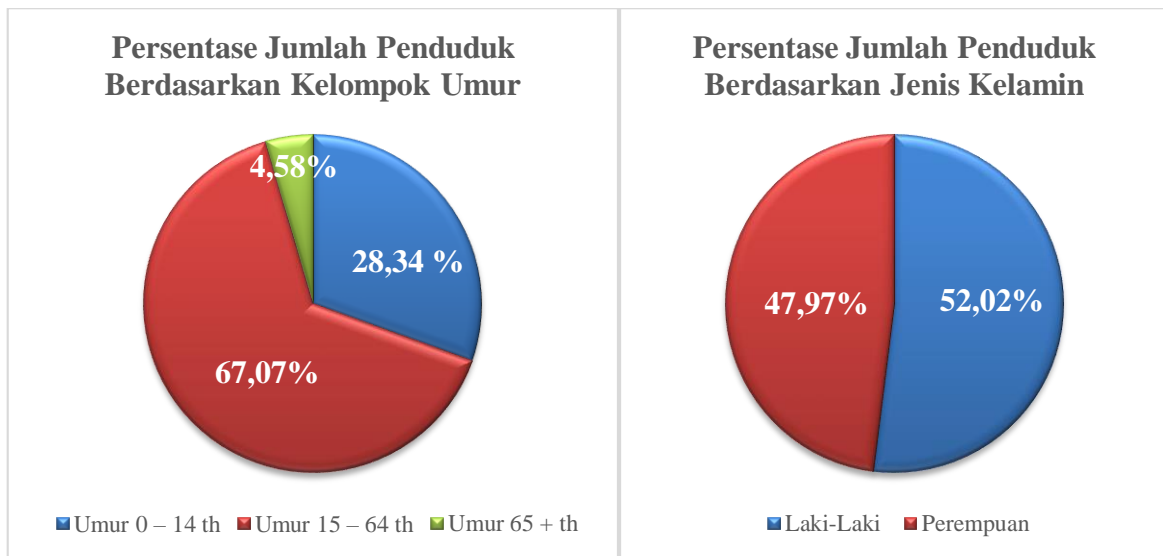
Dilihat dari kelompok umur selama tahun 2014, usia produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 67,07%, sedangkan usia 0 – 14 tahun mencapai 28,34% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 4,58%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015 (Tabel 2.5 dan Bagan 2.1)

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2014

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jumlah	Kepadatan Penduduk
		0 – 14	15 – 64	65 +	Laki-Laki	Perempuan	Rasio		(Jiwa/km ²)
2014	Jiwa	35.154	83.178	5.683	64.517	59.498	108,44	124.015	13,78
	%	28,34	67,07	4,58	52,02	47,97		100,00	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014, diolah

Bagan 2.1 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014.



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Pulang Pisau, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang

mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor, pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis global tahun 2008, perekonomian Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2010-2014 tumbuh relatif stabil dan menunjukkan tren meningkat.

Bagan 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010-2014



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

Laju pertumbuhan PDRB tahun 2014 sebesar 7,79%. Sumbangan terbesar PDRB tahun 2014 atas dasar Harga Berlaku adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar Rp 1.329.413,33 juta dan atas dasar Harga Konstan (tahun 2010) sebesar Rp 986.707,97 juta. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2010 - 2014 berfluktuasi dan ada kecenderungan meningkat dari 5,00 % menjadi 7,79%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2010 - 2014 tingkat perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau terus meningkat setiap tahun.

b. Pertumbuhan PDRB Sektoral

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB ada dua macam, yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan.

PDRB Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2010 dan 2014 dilihat dari laju pertumbuhan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	778.341,19	867.220,34	991.469,02	1.137.551,51	1.329.413,33
2	Petambangan dan Penggalian	9.682,59	10.987,78	12.598,95	14.259,73	16.186,64
3	Industri Pengolahan	142.275,66	154.532,52	172.269,58	198.344,15	237.659,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	857,78	862,50	875,25	883,10	1.049,25
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah	1.347,67	1.471,33	1.611,84	1.774,80	2.049,01
6	Konstruksi	267.580,12	312.343,74	372.507,48	447.885,35	527.787,67
7	Perdagangan dan Resparasi Mobil	204.478,94	231.044,32	252.172,15	280.127,12	321.714,21
8	Transportasi dan Pergudangan	98.172,11	106.324,10	118.876,68	130.507,71	143.001,17
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	58.326,35	65.995,13	74.629,42	85.420,01	97.535,75
10	Informasi dan Komunikasi	27.778,66	29.718,92	32.365,41	37.116,57	43.353,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.344,94	16.053,61	17.204,32	18.799,92	21.780,09
12	Real Estate	37.183,60	40.277,84	43.222,70	47.469,69	54.408,78
13	Jasa Perusahaan	1.690,20	1.767,43	1.849,88	2.022,22	2.036,70
14	Administrasi Pemerintahan	88.816,51	103.786,10	118.348,40	137.246,10	159.775,11
15	Jasa Pendidikan	136.493,94	158.877,08	171.325,82	181.932,96	196.100,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.609,99	59.655,35	69.485,64	67.878,75	75.594,22
17	Jasa Lainnya	14.913,99	16.610,51	18.544,42	21.334,61	24.185,17
PDRB		1.935.894,23	2.177.528,62	2.469.356,95	2.810.554,30	3.253.630,39

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

Analisis atas dasar harga berlaku (ADHB) berguna untuk mengetahui situasi perekonomian jangka pendek, misalnya pengaruh harga pada tahun tertentu. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHB selama periode 2010-2014 pada masing-masing sektor (Tabel 2.6), terlihat bahwa nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHB terbesar kedua pada tahun 2014 adalah sektor konstruksi. Sedangkan nilai terendah ADHB pada tahun 2014 adalah sektor pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)

No	Sektor	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	778.341,19	807.337,67	853.810,12	908.882,39	986.707,97
2	Petambangan dan Penggalian	9.682,59	10.352,28	11.223,94	12.072,81	12.945,58
3	Industri Pengolahan	142.275,66	148.966,52	156.051,18	168.676,33	184.319,28
4	Pengadaan Listrik dan Gas	857,78	917,21	961,99	1.036,76	1.185,44
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah	1.347,67	1.362,48	1.460,00	1.586,74	1.669,80
6	Konstruksi	267.580,12	295.304,78	328.579,98	366.946,01	399.160,90
7	Perdagangan dan Resparasi Mobil	204.478,94	216.389,51	228.848,49	241.507,97	257.754,18
8	Transportasi dan Pergudangan	98.172,11	98.802,01	102.544,94	105.667,62	108.966,67
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	58.326,35	61.441,52	64.994,00	68.807,63	74.707,85
10	Informasi dan Komunikasi	27.778,66	29.572,56	32.204,90	35.230,92	38.459,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.344,94	15.214,77	15.778,20	16.368,76	17.597,05
12	Real Estate	37.183,60	39.150,44	39.884,34	41.382,84	44.361,73
13	Jasa Perusahaan	1.690,20	1.733,69	1.761,03	1.884,92	1.817,89
14	Administrasi Pemerintahan	88.816,51	95.795,39	102.804,79	110.783,20	120.998,43
15	Jasa Pendidikan	136.493,94	148.482,68	154.822,54	161.601,41	168.149,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.609,99	56.132,17	62.073,98	60.013,81	62.987,08
17	Jasa Lainnya	14.913,99	15.934,82	17.054,08	18.353,50	19.813,55
PDRB		1.935.894,23	2.042.890,52	2.174.858,50	2.320.803,61	2.501.602,28

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

Analisis atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 memberikan gambaran mengenai pola perkembangan secara riil dan bermanfaat untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan PDRB di masa mendatang. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHK selama kurun waktu 2010-2014 pada masing-masing sektor (Tabel 2.7), terlihat bahwa nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHK 2010 terbesar kedua pada tahun 2014 adalah sektor konstruksi. Sedangkan nilai terendah ADHK 2010 pada tahun 2014 adalah sektor pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,06	3,73	5,76	6,45	8,56
2	Petambangan dan Penggalian	4,84	6,92	8,42	7,56	7,23
3	Industri Pengolahan	3,70	4,70	4,76	8,09	9,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,64	6,93	4,88	7,77	14,34
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah	6,68	1,10	7,16	8,68	5,23
6	Konstruksi	6,01	10,36	11,27	11,68	8,78
7	Perdagangan dan Resparasi Mobil	5,68	5,82	5,76	5,53	6,73
8	Transportasi dan Pergudangan	2,59	0,64	3,79	3,05	3,12
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,46	5,34	5,78	5,87	8,57
10	Informasi dan Komunikasi	7,24	6,46	8,90	9,40	9,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,84	6,06	3,70	3,74	7,50
12	Real Estate	0,57	5,29	1,87	3,76	7,20
13	Jasa Perusahaan	1,43	2,57	1,58	7,03	-3,56
14	Administrasi Pemerintahan	6,72	7,86	7,32	7,76	9,22
15	Jasa Pendidikan	0,45	8,78	4,27	4,38	4,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	4,70	10,59	-3,32	4,95
17	Jasa Lainnya	1,39	6,84	7,02	7,62	7,96
PDRB		5,00	5,53	6,46	6,71	7,79

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

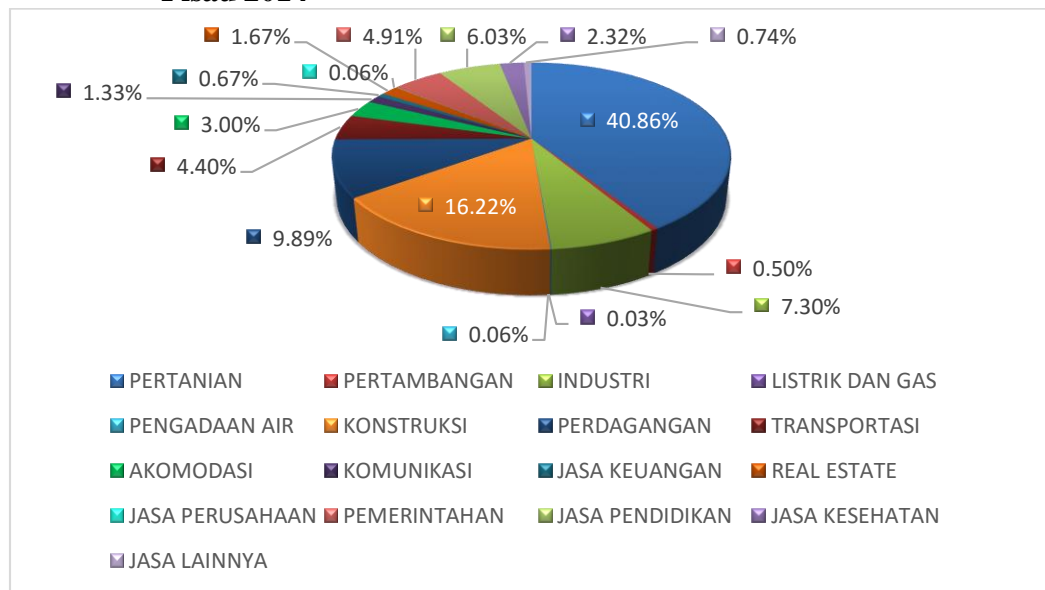
Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2014 terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 14,34%, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 9,27% dan sektor administrasi pemerintahan sebesar 9,22%. Total perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2010 – 2014 meningkat dari 5,00% menjadi 7,79%.

c. Struktur Perekonomian

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat dari suatu sektor ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB. Perekonomian Indonesia sendiri telah mengalami pergerakan/pergeseran struktur selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian nasional mulai digeser peranannya oleh sektor industri pengolahan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, justru sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi andalan utama dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB.

Bagan 2.3 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulang Pisau 2014



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014, yaitu sebesar 40,86%. Kemudian sektor konstruksi sebesar 16,22%, sektor perdagangan sebesar 9,89%, dan sektor industri sebesar 7,30%. Sektor jasa pendidikan 6,03%, sektor administrasi 4,91%, sektor transportasi sebesar 4,40%, sektor akomodasi 3,00% dan sektor yang paling sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014 yaitu sektor pengadaan listrik 0,03%.

d. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan

tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Tabel 2.9 PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010 – 2014

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (rupiah)
2010	10.779.776,27	6.163.103,33
2011	12.003.489,99	6.425.171,54
2012	13 695 420,77	6 849 918,00
2013	-	-
2014	26 235 781,07	20 171 771,80

Sumber: Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau 2015

PDRB per kapita adalah salah satu pendekatan untuk pendapatan per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2010 - 2014 cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010, yaitu untuk nilai atas dasar harga berlaku dari Rp. 10.779.776,27 (tahun 2010) menjadi Rp. 26.235.781,07 (tahun 2014) dan untuk nilai atas dasar konstan 2010 dari Rp. 6.163.103,33 (tahun 2010) menjadi Rp 20.171.771,80 (tahun 2014). PDRB per kapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau.

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Jika diperhatikan pada Tabel 2.10, selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, IPM Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan penurunan kemudian peningkatan, yakni dari 70,63% pada tahun 2010 menurun menjadi 64,06% pada tahun 2011, kemudian meningkat 64,28% pada 2012, 64,76% pada tahun 2013 dan 65,00 pada tahun 2014. Meskipun memiliki trend meningkat, namun IPM Kabupaten Pulang Pisau jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah ataupun dengan rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah yang paling rendah selama kurun waktu 2010-2014. Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau belumlah maksimal.

Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014

No	Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kotawaringin Barat	73.79	74.19	68.63	69.51	70.14
2	Kotawaringin Timur	74.34	74.74	66.61	67.95	68.45
3	Kapuas	73.60	74.00	64.38	64.82	65.29
4	Barito Selatan	73.60	74.01	65.76	66.20	66.61
5	Barito Utara	75.15	75.50	64.72	65.12	66.30
6	Sukamara	71.98	72.42	63.52	63.92	64.44
7	Lamandau	72.32	72.74	66.49	67.23	67.53
8	Seruyan	72.55	72.93	62.39	62.81	63.49
9	Katingan	72.65	73.32	64.87	65.29	65.79
10	Pulang Pisau	71.53	72.37	64.28	64.76	65.00
11	Gunung Mas	73.43	73.73	67.30	67.75	68.13
12	Barito Timur	73.00	73.33	67.97	68.82	69.12
13	Murung Raya	72.84	73.34	64.85	65.62	66.10
14	Kota Palangka Raya	78.30	78.78	77.40	78.02	78.50
15	KALTENG	74.64	75.06	66.66	67.41	67.77

Sumber : Data Bidang Ekonomi dan Statistik Bappeda, 2014

b. Kesehatan

1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah

terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain pendidikan dan ekonomi.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2014 sebesar 67,44 tahun yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau akan mencapai umur 67,44 tahun.

c. Pendidikan

Salah satu keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Pulang Pisau ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Partispasi Sekolah (APS) dari tahun ketahun. Pada Tahun 2012 APS untuk 7-12 Tahun 95,15 % meningkat menjadi 98,40 % pada Tahun 2014. Selanjutnya usia 13-15 tahun 84,83 % pada tahun 2012 meningkat menjadi 87,81 % pada tahun 2014. Usia 16-18 tahun 50,23 % pada tahun 2012 meningkat menjadi 62,30 % pada tahun 2014 dan Usia 19-24 Tahun 10,78 % pada tahun 2012 meningkat menjadi 22,81 % pada tahun 2014. Hal ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dalam menempuh pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ketahun

d. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 sebesar 2,62 persen dan pada Tahun 2014 meningkat menjadi 4,28 persen. Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2014 ini meningkat bila dibandingkan dengan Tahun 2011.

e. Kondisi Kemiskinan

Selama Tahun 2009-2013 di Kabupaten Pulang Pisau terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 6,23 persen pada tahun 2009 menjadi 5,45 persen pada tahun 2013.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap

perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

4. Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Kondisi pelayanan dasar dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Sedangkan kondisi pelayanan penunjang dapat diketahui dari beberapa bidang yakni penanaman modal, KUKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemuda dan olah raga.

1. Pelayanan Dasar

a) Jalan dan Angkutan Darat

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan data BPS tahun 2012-2014 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 2.11 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2012-2014

Jenis Permukaan	2012	2014
Baik	351,47	381,36
Sedang	289,01	354,95
Rusak	376,99	418,01
Jumlah (km)	1.017,47	1.154,32

Sumber: Pulang Pisau Dalam Angka Tahun 2015

Dari tabel, diketahui panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik adalah 381,36 km pada tahun 2014, Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak

b) Rasio Jaringan Irigasi

1. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian.
2. Jaringan irigasi saat ini yang dimiliki Kabupaten Pulang Pisau sudah terdistribusi ke pelosok wilayah di Kabupaten Pulang Pisau. Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan berkoordinasi dengan SKPD lain yang sesuai dengan Tupoksi yang menanganinya.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan

ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan harga konstan 2010 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Pada tahun 2010 PDRB ADHK Kabupaten Pulang Pisau hanya sebesar 666.398,11 Juta Rupiah meningkat menjadi 2.501.602,28 Juta Rupiah pada tahun 2014

2. Iklim Berinvestasi

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan..

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013 dan renstra SKPD tahun 2008-2013 masih belum mencantumkan secara kuantitatif capaian indikator kinerja masing-masing SKPD yang akan dicapai untuk dinilai tingkat pencapaiannya setiap tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Hal ini dikarenakan penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013 belum mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang baru disahkan pada tanggal 21 Oktober 2010.

Sampai dengan tahun 2014, berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah menunjukkan trend peningkatan. Pencapaian yang cukup baik terutama dari kinerja pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2014 sebesar 7,79 persen. merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain di Kalimantan Tengah.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Secara umum semua program telah dilaksanakan semua SKPD dengan baik dan telah terealisasi dan kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut telah tercapai. Capaian terhadap RPJMD tahun 2013 menjadi titik awal kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 yang akan datang. Implikasinya adalah perlunya peningkatan kinerja dari hasil tahun pertama RPJMD Tahun 2013-2018 dan melanjutkan kinerja yang telah tercapai sebelumnya.

2.3. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

2.3.1.1 Masalah Infrastruktur Wilayah

- 1) Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di tiap kecamatan
- 2) Kualitas jalan dan jembatan yang masih rendah
- 3) Jaringan irigasi yang masih sedikit
- 4) Akses air bersih yang masih kecil

2.3.1.2 Masalah Kesehatan

- 1) Belum optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 2) Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- 3) Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah.
- 4) Belum Terpenuhinya secara menyeluruh Sarana Fisik dan Sarana Peralatan Kesehatan lainnya di Tingkat Puskesmas Maupun Jejaringnya

2.3.1.3 Masalah Pendidikan

- 1) Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
- 2) Rendahnya angka rasio sekolah terhadap murid untuk tingkat pendidikan menengah atas
- 3) Rendahnya angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan menengah atas
- 4) Rendahnya angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan menengah atas

2.3.1.4 Masalah Ekonomi Kerakyatan

- 1) Rendahnya jumlah koperasi aktif
- 2) Sistem manajemen usaha koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan
- 3) Sistem kelembagaan koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan;
- 4) SDM pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah;
- 5) Akses untuk pemodalan bagi koperasi dan UMKM yang masih rendah

2.3.1.5 Masalah Pertanian dan Peternakan

- 1) Produktivitas hasil tanaman pangan yang masih rendah.
- 2) Menurunnya populasi ternak sapi
- 3) Rendahnya adopsi dan inovasi teknologi pertanian
- 4) Masih rendahnya keterampilan/keahlian petani dan petugas
- 5) Belum optimal pemberdayaan kelembagaan petani
- 6) Keterbatasan Infrastruktur sarana dan prasarana Peternakan
- 7) Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian produktif/potensial peruntukan lain
- 8) Lemahnya permodalan petani.
- 9) Belum ada komoditas unggulan daerah di bidang peternakan

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a.	Tataran Pengambil Kebijakan			
		Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Wajib	Adanya Perda IMB dan kependudukan	Tidak ada masalah
		Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Wajib	Penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja tepat waktu	Tidak ada masalah
		Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Wajib	Kesesuaian prioritas pembangunan	Tidak ada masalah
		Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib	Perda yang ditetapkan	Tidak ada masalah
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Tidak ada masalah
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Tidak ada masalah
		Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib	Jumlah perda yang dibatalkan	Tidak ada masalah

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib	Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan perda	Tidak ada masalah
		Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Informasi tentang dana perimbangan diusahakan agak lambat diterima yg memengaruhi penganggarannya
		Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	PAD masih kecil persentasenya terhadap pendapatan dalam APBD
		Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Wajib	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Hasil opini memperlihatkan bahwa lapkeu masih ada kekurangannya
		Pengelolaan potensi daerah	Wajib	Peningkatan PAD	Peraturan Daerah untuk mengatur pajak dan retribusi daerah batu keluar, yang membantu meningkatkan PAD
		Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Inovasi masih terbatas
	b.	Tataran Pelaksana Kebijakan			
		Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Wajib/pilihan	Program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Secara khusus nomenklatur program mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang masih ada perbedaan nomenklaturnya

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
					dengan program nasional
		Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib/pilihan	Jumlah PERDA yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.	Sudah ditindaklanjuti
		Tingkat capaian SPM	Wajib/pilihan	SPM yang telah dilaksanakan	Masih ada pelayanan yang belum ada payung hukum untuk penerapan SPM
		Penataan kelembagaan daerah	Wajib/pilihan	Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian
		Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib/pilihan	Struktur jabatan yang terisi pada Tahun yang bersangkutan.	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian
		Perencanaan pembangunan daerah	Wajib/pilihan	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di SKPD	Dokumen perencanaan di SKPD belum tepat waktu disusunnya
		Pengelolaan keuangan daerah	Wajib/pilihan	Anggaran SKPD terhadap total Belanja APBD.	Penetapan pagu anggaran masing-masing SKPD tergantung kepada prioritas program yang dilaksanakannya
		Pengelolaan barang milik daerah	Wajib/pilihan	Keberadaan Inventis barang atau aset SKPD.	Inventarisasi barang milik daerah masih lemah
		Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat	Wajib/pilihan	Jumlah fasilitas/prasarana informasi Papan Pengumuman Pos Pengaduan.	Tidak setiap SKPD memiliki fasilitas/prasarana informasi papan pengumuman
II		Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
		Kesejahteraan masyarakat			

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Pelayanan umum	Wajib/pilihan	Tingkat kepuasan pelayanan	Tidak masalah
		Daya saing daerah	Wajib/pilihan	Besarnya minat investasi ke daerah	Tidak masalah
III		Daerah Otonomi Baru			
		Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Wajib/pilihan	-	Tidak masalah
		Pengisian personil	Wajib/pilihan	-	Tidak masalah

2.4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator makro, menunjukkan trend peningkatan. Pencapaian yang cukup baik terutama dari kinerja pembangunan ekonomi. Pada tahun 2014, ekonomi Kabupaten Pulang Pisau tumbuh sebesar 7,79 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi tahun sebelumnya yaitu 6,99 persen. Pertumbuhan tersebut mempengaruhi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 6,23 % pada tahun 2009 menjadi 5,45% pada tahun 2013. Sedangkan tingkat pengangguran sedikit mengalami peningkatan, dari 2,62 persen pada tahun 2011 menjadi 4,28 persen ditahun 2014 dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 mencapai 57.403 orang.

Capaian Kinerja Pembangunan lainnya juga dapat dilihat dari capaian indikator lain antara lain di Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan bidang lainnya. Secara lengkap kemajuan Indikator-indikator makro ekonomi sebagai capaian kinerja tiap tahun yang terukur sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.13
PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2010 - 2014

No.	Indikator	Kondisi		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Tahun 2011	Tahun 2012	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bidang Ekonomi dan Sosial						
	Pertumbuhan PDRB (ADHB)	10,78	13,34	13,80	13,34	13,00	13,20
	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,21	5,53	5,80	6,00	6,20	6,99
	Persentase penduduk miskin	7,07	6,00	< 5,8	5,48	< 5,5	5,18
	Angka Pengangguran	2,26	2,11	< 2,5	2,62	< 2,5	2,59
2.	Bidang Pendidikan						
	APK SD/SDLB/MI	98,73	114,93	107,14	108,32	102,21	104,14
	APK SMP/MTs	87,00	98,06	81,15	82,23	86,27	88,07
	APK SMA/SMK/MA	74,89	88,41	58,88	60,56	56,21	58,44
	APM SD/SDLB/MI	95,11	97,65	93,00	95,00	84,12	88,02
	APM SMP/MTs	84,60	86,19	70,12	73,57	62,15	65,47
	APM SMA/SMK/MA	54,74	81,83	50,11	53,33	38,06	40,86
3	Bidang Kesehatan						
	Angka Kematian Bayi	35,00	140,00	140,00	161,00	169	227,00
	Angka Harapan Hidup	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
	Persentase Balita Gizi buruk	62,5	64,6	64,9	65,3	66,80	67,74
	Angka Kematian Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,009
4	Bidang Pekerjaan Umum						
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	26,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
	Rasio Jaringan Irigasi	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,64

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 Dan RPJMD

Capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 perlu dievaluasi pencapaian kinerja pembangunan menurut urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan serta bidang. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 dengan RPJMD belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 masih ada indikator yang belum secara spesifik ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja yang harus dicapai serta belum adanya estimasi

perkembangan komponen indikator kinerja per tahun sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Secara garis besar pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 dan realisasinya pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 2.14
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015

NO.	SKPD	BELANJA LANGSUNG			
		PAGU BL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp.	Persentase	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	31,615,256,375.77	28,906,440,830.00	91.43	96.72
2	Sekretariat DPRD	13,190,858,000.00	11,639,524,444.00	88.24	88.24
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,572,594,750.74	7,598,833,462.00	88.64	98.58
4	Badan Lingkungan Hidup	5,436,333,000.00	5,279,446,696.00	97.11	100.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,700,000,000.00	2,583,971,698.00	95.70	95.70
6	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	2,100,000,000.00	2,054,586,932.00	97.84	97.84
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	3,770,000,000.00	3,605,361,706.00	95.63	95.63
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,250,000,000.00	4,078,822,725.00	95.97	95.97
9	Badan Perpustakaan Arsip & Dokumentasi Daerah	1,450,000,000.00	1,383,215,748.00	95.39	95.39
10	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	6,334,131,500.00	6,268,768,201.00	98.97	100.00
11	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,600,000,000.00	3,431,736,332.00	95.33	98.04
12	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11,039,891,300.00	9,025,622,026.01	81.75	100.00
13	Dinas Pendidikan	58,629,031,750.00	54,797,046,392.00	93.46	93.46
14	Dinas Kesehatan	23,283,944,795.00	22,503,595,059.00	96.65	99.94
15	Dinas Pekerjaan Umum	281,489,091,200.59	254,130,368,423.21	90.28	99.54
16	Dinas Pertanian dan Peternakan	25,936,169,427.00	25,203,852,709.00	97.18	96.58
17	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	17,247,492,872.00	16,396,122,912.00	95.06	100.00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	16,316,086,975.00	15,312,323,937.00	93.85	98.49

19	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9,264,130,550.00	9,112,167,023.00	98.36	98.36
20	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	3,080,735,000.00	2,949,851,200.00	95.75	95.75
1	2	3	4	5	6
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,500,000,000.00	3,205,256,348.00	91.58	91.58
22	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	18,274,632,250.00	17,556,680,539.00	96.07	97.03
23	Inspektorat	3,419,000,000.00	3,383,157,234.00	98.95	98.95
24	Rumah Sakit Umum Daerah	20,322,000,000.00	19,347,707,157.00	95.21	95.21
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2,020,000,000.00	1,991,532,649.00	98.59	98.59
26	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2,418,000,000.00	2,330,165,650.00	96.37	96.37
27	Kantor Kecamatan Kahayan Hilir	916,950,000.00	905,813,695.00	98.79	98.79
28	Kantor Kecamatan Kahayan Kuala	635,000,000.00	622,835,258.00	98.08	98.08
29	Kantor Kecamatan Kahayan Tengah	576,000,000.00	554,758,241.00	96.31	96.31
30	Kantor Kecamatan Maliku	626,986,000.00	621,575,700.00	99.14	99.14
31	Kantor Kecamatan Banama Tingang	586,986,000.00	523,081,500.00	89.11	89.11
32	Kantor Kecamatan Pandih Batu	626,986,000.00	624,612,311.00	99.62	99.62
33	Kantor Kecamatan Jabiren Raya	596,986,000.00	544,020,500.00	91.13	91.13
34	Kantor Kecamatan Sebangau Kuala	645,000,000.00	635,540,000.00	98.53	98.53
35	Kantor Kelurahan Pulang Pisau	197,500,000.00	191,944,360.00	97.19	97.19
36	Kantor Kelurahan Kalawa	172,500,000.00	161,839,840.00	93.82	93.82
37	Kantor Kelurahan Bereng	172,500,000.00	156,388,100.00	90.66	90.66
38	Kantor Kelurahan Bahaur Basantan	172,500,000.00	161,355,000.00	93.54	93.54
JUMLAH		585,185,273,746.10	539,779,922,537.22	92.24	97.94